

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (Analisis Data Tahun 2012-2023)

Agustina¹, Sri Wahyuni^{2*}, Asrida²

¹Alumni FE Universitas Almuslim Bireuen

²Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Almuslim Bireuen

*) email: wahyuni1313@gmail.com

Received: March 14, 2024; Accepted: March 15, 2024; Published: March 16, 2024; Page: 7 – 13

DOI: [10.51179/eko.v16i1.2567](https://doi.org/10.51179/eko.v16i1.2567)

ABSTRACT:

This research aims to analyze and explain the influence of Economic Growth and the Human Development Index on Tax Revenue during 2012-2023 in Indonesia. Quantitative research using multiple regression methods. The results of this research state that economic growth has a positive effect on tax revenue, and HDI also has a positive effect on tax revenue. The simultaneous contribution of economic growth factors and HDI to tax revenues is 89.8%.

Keywords: economic growth, human development index, tax revenue

ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Penerimaan Pajak selama tahun 2012-2023 di Indonesia. Penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode Regresi berganda. Hasil penelitian ini menyatakan Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, dan juga IPM berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Kontribusi secara simultan faktor pertumbuhan ekonomi dan IPM terhadap penerimaan pajak sebesar 89,8%.

Kata Kunci: pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, penerimaan pajak

1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian. karena pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya. Demi kelangsungan hidup negara. maka wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak secara teratur. sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat (Rofiana Adawiyah & Eprianto. 2023). Dan hasil dari pemungutan pajak digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. seperti yang tertuang dalam undang-undang no. 28 tahun 2007.

Sanjaya & Anis (2022) menyatakan "Penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah

menjadi fokus utama dan memiliki hubungan dengan pertumbuhan ekonomi.

Reformasi perpajakan daerah di Indonesia sudah berlangsung selama kurang lebih dua puluh tahun. Tujuan dari reformasi perpajakan tersebut adalah untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan yang akan digunakan untuk pembangunan daerah. yang dapat diukur salah satunya dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Maka Peneliti berasumsi terdapat pengaruh IPM. terhadap penerimaan pajak daerah.

Menurut Saragih A. H. (2019). IPM merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup. pendidikan dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan sebuah negara termasuk

negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Jika membaca informasi data index pembangunan manusia dan penerimaan pajak serta pertumbuhan ekonomi ada kaitan, seperti dideskripsikan berikut:

Tabel 1. Data IPM, Penerimaan pajak dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Thn	Wajib Pajak	Penerimaan Pajak (Milyar Rp)	IPM %	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2019	73.06%	1546141.9	71.8%	5.02
2020	77.63%	1285136.32	73%	-2.07
2021	84.07%	1547841.1	49%	9.83
2022	83.2%	1924937.5	86%	5.31
2023	Meningkat 15.41%	2016923.7	84%	4.5-5.3

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Penelitian ini, akan mengungkap (1) Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan pajak? dan (2) Apakah IPM berpengaruh terhadap penerimaan pajak?

2. Tinjauan Teori

Penerimaan Pajak

Menurut Akhadi (2022), pajak merupakan satu bentuk sumbangan yang dapat diberikan oleh warga kepada pemerintah, di mana dana yang terkumpul dari pembayaran pajak tersebut akan dipergunakan kembali untuk membiayai proyek pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan Yuesti (2022), menyatakan bahwa pajak merupakan kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas kepada pemerintah sesuai dengan peraturan hukum yang bersifat mengikat, tanpa adanya imbalan langsung sebagai konsekuensi.

Sedangkan Sutedi (2022) menyatakan pemungutan pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum untuk mencakup biaya produksi barang dan jasa bersama guna mencapai kesejahteraan secara umum. Tujuan utamanya adalah mendukung pendanaan kebutuhan mendesak seperti penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah. (Asterina & Septiani, 2019) menyatakan bahwa salah satu peran penting pajak adalah dalam hal penerimaan anggaran (*budgetair*). Artinya, pajak berperan sebagai sumber dana yang digunakan untuk mendukung pembiayaan berbagai pengeluaran pemerintah.

Penerimaan Pajak mencakup segala bentuk penerimaan negara, termasuk pendapatan dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan inter-

nasional (Suryadi & Subardjo (2019). Penerimaan negara menjadi sumber utama pembiayaan untuk mendukung kegiatan pemerintah dalam mencapai kemandirian dan kelangsungan, khusus-nya untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran negara yang terus meningkat seiring berjalannya waktu. Hal kemudian diatur dalam UU RI Nomor 27 Tahun 2014.

Menurut Mulyanti & Sunarjo (2019) dan Atawarman (2020), bahwa penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan yang dapat diperoleh secara berkelanjutan dan dapat diperluas sesuai kebutuhan. Ini harus sejalan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yang dapat ditingkatkan melalui perubahan PTKP. Besarnya pendapatan pajak sangat dipengaruhi sejauh mana masyarakat menyadari dan mematuhi kewajiban perpajakannya, serta seberapa besar tarif pajak yang telah ditetapkan.

Pendapatan pajak berasal dari berbagai sumber, antara lain Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Meterai. Keempat jenis pajak ini merupakan instrumen penting dalam menghasilkan pendapatan bagi pemerintah dan berkontribusi terhadap pembiayaan berbagai program pembangunan.

Sinambela (2019), menyebutkan penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat eksternal mencakup pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, harga minyak internasional, produksi minyak mentah, harga minyak internasional, dan tingkat suku bunga. Di sisi lain, faktor internal yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah besaran tarif pajak itu sendiri.

Wulandari & Aprilia (2022) mencatat bahwa adanya pertumbuhan ekonomi berdampak positif terhadap penerimaan pajak, terutama melalui peningkatan pendapatan masyarakat dan tingkat konsumsi yang meningkat.



Gambar 1.

Penerimaan Pajak di Indonesia (2012-2023)

Penerimaan pajak (Milyar Rupiah) dapat dilihat berdasarkan data yang di peroleh dari BPS menga-

lami fluktuasi dari tahun 2012 hingga 2023.

Pertumbuhan Ekonomi

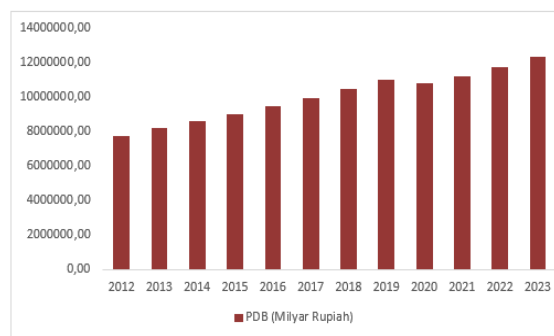
Pertumbuhan ekonomi mencakup peningkatan pendapatan negara secara nasional secara keseluruhan atau peningkatan output dalam suatu periode tertentu. Selain itu, aspek lain dari pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam hal fisik, yang terjadi seiring berjalannya waktu tertentu (Indayani, 2020). Sedangkan Yuniarti dkk. (2020), menyatakan pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan kemampuan jangka panjang suatu negara untuk menyediakan berbagai produk ekonomi kepada penduduknya.

Menurut penelitian Susanto & Pangesti (2020), pertumbuhan ekonomi merujuk pada perluasan kapasitas produksi dalam suatu perekonomian yang menghasilkan output dari berbagai sektor ekonomi. Menurut Menajang (2019), pertumbuhan ekonomi mencerminkan transformasi yang bersifat kuantitatif, umumnya diukur melalui Parameter Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan per kapita dari hasil produksi.

Dan Yasin (2020) menyampaikan pertumbuhan ekonomi merupakan suatu perubahan yang berkelanjutan dalam kondisi perekonomian suatu negara menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.

Keynes dalam (Surgawi, 2020) menyatakan bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, diperlukan implementasi kebijakan fiskal, baik melalui peningkatan penerimaan pemerintah melalui pajak maupun melalui peningkatan pengeluaran pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang memainkan peran penting dalam menggerakkan aktivitas ekonomi suatu negara. Faktor-faktor ini mencakup aspek-aspek seperti wajib pajak, indeks pembangunan manusia, dan pengeluaran pemerintah.



Gambar 2. Produk Domestik Bruto di Indonesia Tahun 2012-2023

Berdasarkan data yang diperoleh dari World Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam persentase *Produk Domestik Bruto* (GDP Growth %) menunjukkan fluktuasi selama beberapa tahun terakhir (Gambar 2).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

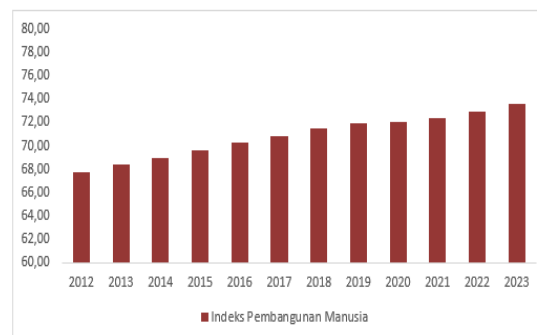
Kemajuan suatu daerah dapat diukur melalui pembangunan manusia sebagai salah satu indikator utama. Kualitas manusia di suatu wilayah menjadi faktor kunci yang memengaruhi hasil pembangunan. UNDP menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai alat untuk menilai tingkat keberhasilan pembangunan manusia.

IPM merupakan tolak ukur dalam pencapaian pembangunan manusia yang lebih berkualitas (Hasibuan & Rujiman, 2020). Ada tiga dimensi dasar sebagai acuan untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia yaitu meliputi *a long and healthy life*, *knowledge*, dan *desend standart of living* (Hasibuan & Rujiman, 2020).

Menurut Kiha (2021), bahwa IPM alat ukur yang efektif untuk menilai kesejahteraan masyarakat, dengan mempertimbangkan beberapa aspek utama seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Penggunaan IPM membantu dalam membandingkan kemajuan pembangunan manusia, baik dalam skala antarnegara maupun antardaerah.

Herdiansyah & Kurniati (2020), menyatakan bahwa IPM alat pengukuran capaian pembangunan manusia berdasarkan tiga dimensi dasar: kesehatan, pengetahuan, dan kehidupan layak. Dimensi-dimensi ini mencakup aspek kesehatan melalui angka harapan hidup dan kelahiran, pengetahuan melalui indikator melek huruf dan rata-rata lama sekolah, dan kehidupan yang layak ayas dasar daya beli masyarakat dan rata-rata pengeluaran per kapita.

Perkembangan IPM di Indonesia terus menunjukkan peningkatan, sebagaimana dideskripsikan dalam data berikut (Gambar-3).



Gambar 3. IPM di Indonesia Tahun 2012-2023

Penerimaan Pajak berpengaruh terhadap IPM

Menurut Saragih A. H. (2018). penerimaan pajak daerah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Temuan ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang kuat antara tingkat penerimaan pajak daerah dan peningkatan tingkat kesejahteraan dan perkembangan manusia di suatu wilayah. Penerimaan pajak daerah yang dikelola dengan baik, dapat dialokasikan ke sektor-sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan IPM.

Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak

Tujuan dari reformasi perpajakan tersebut adalah untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan yang pada akhirnya akan digunakan untuk kemakmuran rakyat melalui pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Penelitian Sarjono et al. (2018) mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Temuan ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah.

Hubungan IPM dan Pertumbuhan Ekonomi

Bahwa indeks pembangunan manusia mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendidikan merupakan tolak ukur dari adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai bekal dalam memasuki dunia kerja dan untuk meningkatkan produktivitas. Pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan menyokong secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian Putri & Desmawan (2022) bahwa IPM yang mencakup taraf Pendidikan dan taraf Kesehatan berhubungan dan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Demikian pula penelitian Ariyanto dan Handaka (2017) menyimpulkan IPM berpengaruh positif terhadap PDRB kabupaten/Kota di Indonesia. Dan Penelitian Ridwan M. & Prasetyo A B (2013) pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap IPM.

3. Metodologi

Penelitian ini bersifat kuantitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder selama 10 tahun dari tahun 2014-2023, bersumber dari website BPS (Badan Pusat Statistik) dan Kementerian Keuangan.

Penelitian ini mencoba menghubungkan variabel pertumbuhan ekonomi dan IPM terhadap Penerimaan Pajak, menggunakan analisis regresi berganda.

4. Hasil dan Pembahasan

a). Uji Asumsi Model

Uji Normalitas

Untuk pengujiannya dideteksi melalui uji Kolmogorov-Smirnov yang hasilnya sebagai berikut:

Tabel 6. Uji Normalitas dengan K-S

		Pert_Eko	IPM	Pajak
N		12	12	12
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	4.2373	70.7875	1427.0350
	Std. Deviation	2.10246	1.87088	352.45754
Most Extreme Differences	Absolute	.369	.144	.199
	Positive	.265	.093	.199
	Negative	-.369	-.144	-.124
Test Statistic		.369	.144	.199
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c	.200 ^{c,d}	.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Hasil dari nilai Asymp. Sig (dua pihak) diketahui nilainya dibawah 5% maka sesuai ketentuan uji ini disimpulkan data berdistribusi normal, sehingga asumsi ini dipenuhi.

Uji Multikolinearitas

Hal yang akan bisa mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel independent. Dasar pengambilan keputusan, yakni jika: a) Nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 maka artinya tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. b) Berdasarkan Nilai VIF (*Variance Inflation Factor*), jika $VIF < 10,00$ maka artinya tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	t	Sig.	Collinearity Statistics	
			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-7.815	.000		
Pert_Eko	2.937	.017	.989	1.012
IPM	8.720	.000	.989	1.012

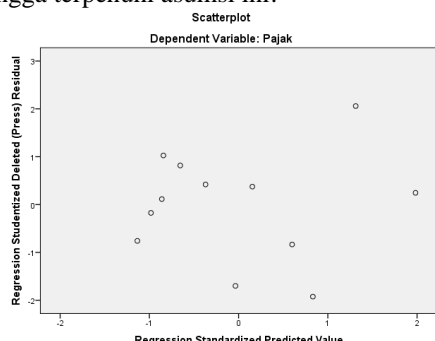
a. Dependent Variabl

Tolerance > 0,10 dan VIF < 10,00 maka tidak terjadi gangguan multikolinieritas.

Uji Heterokedastisitas

Mengecek residual dari model yang diamati tidak memiliki varian yang konstan dari satu observasi ke observasi lainnya. Deteksi dapat dilakukan dengan *scatterplot* berikut (Santoso,

2009). Tampak dari hasil uji (gambar 4) bahwa, data menyebar random, tidak membentuk pola, sehingga terpenuhi asumsi ini:



Gambar 4. Uji Heterokedastisitas

b). Hasil Analisis Regresi

Data yang dianalisis dari ketiga variabel yakni:

Tabel 3. Data Variabel yang Dianalisis

Thn	Pertumbuhan Ekonomi (PDB Triliun)	IPM %	Penerimaan Pajak (Triliun Rp)	
2012	7.727,083	3,17	67,70	980,518
2013	8.156,498	5,56	68,31	1.077,307
2014	8.564,867	5,01	68,90	1.146,866
2015	8.982,517	4,88	69,55	1.240,419
2016	9.434,613	5,03	70,18	1.284,970
2017	9.912,928	5,07	70,81	1.343,530
2018	10.425,852	5,17	71,39	1.518,790
2019	10.949,155	5,02	71,92	1.546,142
2020	10.722,999	-2,07	71,94	1.285,136.
2021	11.120,060	3,70	72,29	1.547,841
2022	11.710,248	5,31	72,91	2.034,553
2023	12.301,394	5,05	73,55	2.118,348

Model analisis regresi berganda berdasarkan pengujian uji-F dinyatakan signifikan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4. Model Regresi dan Pengujiannya

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1228460,002	2	614230,001	40,050	,000 ^b
	Residual	138029,510	9	15336,612		
	Total	1366489,512	11			

a. Dependent Variable: Pajak
b. Predictors: (Constant), IPM, Pert_Eko

Hasil koefisien regresi dan pengujiannya dinyatakan berikut ini:

Tabel 5. Taksiran Koefisien Regresi dan Pengujian

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-11186,565	1431,510		-7,815	,000
	Pert_Eko	52,456	17,863	,313	2,937	,017
	IPM	175,050	20,074	,929	8,720	,000

a. Dependent Variable: Pajak

Maka dari tabel diatas, dengan menetapkan taraf uji 5%, kesemua koefisien regresi dinyatakan signifikan. Sehingga disimpulkan: (a) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap Penerimaan

Pajak, (b) Faktor IPM berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

c. Pembahasan

1). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan pajak, dinyatakan dengan koefisien regresinya positif, sebesar 52,458. Maknanya, adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi berdampak pada naiknya penerimaan pajak. Hal ini juga didukung penelitian Nugroho A., Doktoralina, C. M. (2010), menemukan peningkatan produk domestik bruto mempunyai hubungan positif dalam meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Jumlah kenaikan atau penurunan produk domestik bruto dalam suatu perekonomian dijelaskan dari sisi penerimaan faktor produksi merupakan objek Pajak Penghasilan.

Juga riset Inriama, M., & Setyowati, M. (2020) menyatakan kenaikan atau penurunan GDP dan *tax rate* akan mempengaruhi kenaikan atau penurunan penerimaan PPh Badan. Dan penelitian Darmawan, dkk (2023) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan inflasi berdampak pada pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai dalam jangka panjang dan jangka pendek. Pertumbuhan ekonomi berdampak positif dan signifikan sedangkan inflasi berdampak negatif dan signifikan.

2). Pengaruh IPM terhadap Penerimaan Pajak

IPM berpengaruh terhadap penerimaan pajak, dinyatakan dengan koefisien regresinya positif, sebesar 175,05. Juga bermakna, jika terjadi kenaikan pada IPM akan ikut meningkatkan penerimaan pajak atas kesadaran dan kualitas penduduk. Hal ini senada dengan penelitian Prasetyoningrum & Sukmawato (2018), dengan hasil menunjukkan bahwa IPM berpengaruh secara langsung dan negatif terhadap tingkat kemiskinan. Artinya jika jika IPM meningkat akan bisa menyumbangkan pajak, karena berkemampuan.

3). Pengaruh Secara Simultans

Penelitian ini juga menguji koefisien korelasi (R) dan koefisien determinasi (R²). Hasil analisis koefisien korelasi mendeskripsikan secara simultans pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi dan IPM terhadap Penerimaan Pajak sangat erat dengan derajat keterikatannya

sebesar 0,948. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,899 menjelaskan bahwa kontribusi faktor Pertumbuhan ekonomi dan IPM terhadap Penerimaan Pajak sebesar 89,8%.

Tabel 6. Koefisien Korelasi Simultan

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.948 ^a	.899	.877	123.84108	1.042

a. Predictors: (Constant), IPM, Pert_Eko

b. Dependent Variable: Pajak

5. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai masalah, diperoleh simpulan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, dan juga IPM berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Kontribusi secara simultan faktor pertumbuhan ekonomi dan IPM terhadap penerimaan pajak sebesar 89,8%.

Daftar Pustaka

- Akhadi. I. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak terhadap Variabel Pendapatan Perkapita dan angka Kemiskinan Sebagai Indikator Kemakmuran Rakyat. *Jurnal Pajak Indonesia*. 31(03)60-72.
- Andriani. A. & Ramadan. A. (2020). Analisis Pemeriksaan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di kantor pelayanan pajak pratama jakarta tanah abang satu tahun 2016-2-2018. *Jurnal Pajak Vokasi (Jupasi)*. 1(2)2686-1585.
- Anik Yuesti (2022). Kepatuhan Waib Pajak di kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi. *Media Akuntansi Perpajakan*. 7(1)7-18.
- Ariyanto dan Handaka (2017). Analisis Pengaruh Belanja Modal. Indeks Pembangunan Manusia. dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Indonesia
- Asterina. F. & Septiani. C. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak. Sanksi Perpajakan. Pemeriksaan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (wpop). *Balance Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*. 4(2).
- Atarwaman (2020). Penagruh Kesadaran Wajib Pajak. Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi*. 6(1)39-51.
- Hasibuan. L. S.. Sukardi & Rujiman (2020). Analisis Determinan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*. 5(2). 139-141.
- Herdiansyah. D. & Kurniati. P. S. (2020). Pembangunan Sektor Pendidikan sebagai

- Penunjang Indeks Pembangunan Manusia di kota Bandung. *Jurnal Agregasi*. 8(1)43-50.
- Indayani. (2020). Analisis Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Akibat Pandemi covid-19. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Akademi Bina Sarana Informatika*. 18(2).
- Indra Darmawan I., Sahri, Harsono I., Irwan M. (2023). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ganec Swara*, 17(3): 1054-1067, ISSN 1978-0125 (Print)
- Inriama, M., & Setyowati, M. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Foreign Direct Investment dan Tax Rate Terhadap Penerimaan PPh Badan Negara ASEAN. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(4), 325 - 342.
- Kiha. E. K. (2021). Pengaruh Jumlah Penduduk. Pengangguran. dan kemiskinan terhadap manusia (IPM) d kabupaten Belu. *Jurnal Ekonomi*. 2(07)60-84.
- Menajang. (2019). Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado. Manado : Universitas Sam Ratulangi. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id>.
- Mulyanti. D. & Sunarjo. V. F. (2019). Implikasi Tingkat Kepatuhan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan. *Ekono Insentif*. 13(1)16-26.
- Naura A. Asko Putri & Desmawan (2022). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di privinsi baten. *Journal Of Education Technology Information*. 1(1)64-70.
- Nugroho A., Doktoralina, C. M. (2010). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak. *Profita (Komunikasi Ilmiah dan Perpajakan)* ISSN: 2086-7622, Volume: 1, No.2, 2010
- Prasetyoningrum A. K. & Sukmawati U. S. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Indonesia, *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2): 217 – 240, E-ISSN: 2502-8316
- Rofiana Adawiyah & Eprianto. I. (2023). Literature review: Pengaruh Sosialisasi Perpajakan. Sanksi Perpajakan. Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Economina*. 2(9);2963-1181.
- Sanjaya. I. W. & Anis. A. (2022). Analisis Kausalitas Penerimaan Pajak. Pengeluaran Pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*. 3(4);27-42.

- Saragih. A. H. (2019). An Analysis of Local Taxes revenue' effect on Human Devepment Index. *Jurnal Economica*. 21831-21595.
- Sinambela. T. (2019). Pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah dan jumlah pengusaha kena pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Ekuivalensi*. 5(1)85-97.
- Surgawi (2020). Pengeluaran pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi: Hipotesis Keynes Versus Teori Wagner. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. 1(1)25-34.
- Suryadi. T. L. & Subardjo. A. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi Jira*. 8(4).
- Susanto. R.. & Indah Pangesti. (2020). Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Journal of Applied Business and Economics (JABE)*. 7(2). 271–278
- Sutedi. A. (2022). *Hukum Pajak*. Sinar grafika.
- Widia W & Bur Afni Aprilia K. (2022). Upaya Peningkatan Pendapatan Nasional Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Eqied-Journal of Economics and business*. 11(03)538-545.